



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERAN PARTAI POLITIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Zaid Afif¹, Gusnaila Nasution², Nuriani Ningsih³

Email: ¹dtm.zaid@gmail.com, ²GusnailaNasution@gmail.com,

³NurianiNingsih@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan terhadap kinerja anggota DPRD merupakan fungsi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi lokal dan akuntabilitas wakil rakyat di daerah. Dalam konteks Kota Tanjungbalai, peran partai politik menjadi vital mengingat partai adalah wadah utama rekrutmen dan kontrol terhadap anggota legislatif. Namun dalam praktiknya, pengawasan partai terhadap anggotanya di DPRD kerap tidak berjalan efektif, sehingga menyebabkan lemahnya fungsi representasi dan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran partai politik dalam mengawasi kinerja anggota DPRD Kota Tanjungbalai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik masih lemah dalam melakukan kontrol struktural terhadap anggotanya di legislatif akibat minimnya mekanisme evaluasi internal, konflik kepentingan, serta dominasi kepentingan pragmatis. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi internal partai serta penguatan mekanisme akuntabilitas politik agar pengawasan terhadap anggota DPRD menjadi lebih efektif.

Kata Kunci : Partai Politik, Pengawasan, Akuntabilitas

Abstract

Oversight of the performance of Regional People's Representative Council (DPRD) members is a strategic function in maintaining the quality of local democracy and the accountability of regional representatives. In the context of Tanjungbalai City, the role of political parties is vital, given that they are the primary vehicle for recruitment and control of legislative members. However, in practice, party oversight of their DPRD members is often ineffective, weakening their representational and legislative functions. This study aims to examine the role of political parties in overseeing the performance of Tanjungbalai City DPRD members and the factors influencing it. The method used is descriptive qualitative with an empirical approach through interviews and documentation. The results indicate that political parties remain weak in exercising structural control over their members in the legislature due to a lack of

internal evaluation mechanisms, conflicts of interest, and the dominance of pragmatic interests. Therefore, internal party reform and strengthening of political accountability mechanisms are needed to make oversight of DPRD members more effective.

Keywords: Political Parties, Oversight, Accountability.

A. Pendahuluan

Partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik tidak hanya berperan sebagai instrumen rekrutmen politik dan penyambung aspirasi rakyat, tetapi juga memiliki tanggung jawab penting dalam mengontrol dan mengawasi para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa para legislator bertindak sesuai dengan platform partai dan aspirasi konstituen yang mereka wakili.

Dalam sistem pemerintahan daerah yang berbasis pada prinsip otonomi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting karena lembaga ini memegang kekuasaan legislatif di tingkat lokal. DPRD berfungsi tidak hanya sebagai pembuat kebijakan daerah bersama kepala daerah, tetapi juga sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kinerja DPRD sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Namun, kenyataannya, keberadaan DPRD di berbagai daerah seringkali tidak diimbangi dengan kinerja yang optimal. Banyak laporan menunjukkan bahwa DPRD tidak menjalankan fungsinya secara maksimal, baik dalam hal legislasi, anggaran, maupun pengawasan terhadap eksekutif. Tidak sedikit pula kasus di mana anggota

DPRD terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis, bahkan melanggar hukum, seperti korupsi, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai mekanisme kontrol terhadap anggota DPRD, khususnya oleh partai politik sebagai institusi yang mengusung mereka.

Di Kota Tanjungbalai, yang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara, dinamika politik lokal mencerminkan berbagai persoalan yang jamak terjadi di daerah lain di Indonesia. DPRD Kota Tanjungbalai terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai partai politik yang memiliki kepentingan, latar belakang, serta pendekatan politik yang berbeda-beda. Dalam banyak kasus, kinerja legislator di kota ini tidak lepas dari sorotan masyarakat dan media, terutama terkait minimnya partisipasi dalam pembahasan kebijakan publik, lemahnya peran dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta dugaan adanya kepentingan transaksional dalam pengambilan keputusan politik.

Peran partai politik dalam konteks ini menjadi sangat strategis. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas formal terhadap kader-kadernya yang duduk di legislatif, partai politik idealnya menjalankan fungsi kontrol internal melalui berbagai mekanisme, seperti evaluasi berkala, pemberian sanksi atas pelanggaran etika, hingga pencabutan

dukungan politik terhadap anggota DPRD yang terbukti menyimpang dari garis perjuangan partai. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak partai politik lebih fokus pada agenda pemenangan pemilu atau negosiasi kekuasaan daripada melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kadernya.

Fakta ini mengindikasikan bahwa partai politik menghadapi tantangan serius dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain persoalan struktural seperti lemahnya kelembagaan partai di tingkat daerah, terdapat pula hambatan kultural seperti budaya patronase, politik uang, serta loyalitas ganda kader terhadap elite politik tertentu dibandingkan terhadap institusi partai secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan lemahnya posisi partai dalam mengontrol perilaku politik anggotanya di DPRD.

Lebih jauh lagi, kondisi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme demokrasi partisipatif dan praktik politik elektoral yang cenderung pragmatis. Kader partai yang telah terpilih menjadi anggota DPRD kerap merasa independen atau bahkan otonom dari kontrol partai, terutama ketika mereka memiliki kekuatan finansial atau dukungan massa yang signifikan. Dalam beberapa kasus, hal ini mengarah pada terjadinya disfungsi representasi, di mana anggota dewan tidak lagi mewakili suara rakyat atau partai, tetapi justru bertindak atas nama kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara kritis dan komprehensif bagaimana partai politik menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Tanjungbalai. Penelitian ini menelusuri mekanisme formal dan informal yang digunakan partai, mengevaluasi sejauh mana pengawasan itu berjalan efektif, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan partai politik terhadap wakil-wakilnya di lembaga legislatif.

Dengan mengambil studi kasus di Kota Tanjungbalai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ilmu politik, khususnya studi tentang demokrasi lokal dan penguatan institusi partai politik. Lebih dari itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi aktor-aktor politik, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil dalam mendorong perbaikan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris, yaitu berdasarkan pada data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial-politik secara mendalam, khususnya terkait

peran partai politik dalam mengawasi kinerja anggota DPRD Kota Tanjungbalai. Penelitian dilakukan di Kota Tanjungbalai selama bulan Mei hingga Juli 2025. Informan utama terdiri dari pengurus partai politik tingkat kota, anggota DPRD dari berbagai fraksi, serta tokoh masyarakat dan akademisi yang memahami dinamika politik lokal. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan posisi, pengalaman, dan pengetahuannya terhadap isu yang diteliti.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan informan secara bebas namun terarah. Observasi dilakukan pada kegiatan DPRD dan aktivitas partai, sedangkan dokumentasi mencakup AD/ART partai, laporan kinerja DPRD, dan berita media lokal. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta verifikasi hasil kepada informan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1) Peran Partai Politik dalam Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Tanjungbalai

Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penghubung antara rakyat dengan lembaga legislatif. Partai

politik bukan hanya alat untuk meraih kekuasaan melalui pemilu, tetapi juga memiliki fungsi kelembagaan yang melekat, yakni melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kader-kadernya, terutama yang telah duduk di kursi legislatif seperti DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh partai terhadap anggota legislatif menjadi salah satu instrumen penting untuk menjamin terlaksananya prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.

Konteks di Kota Tanjungbalai menunjukkan bahwa meskipun secara normatif partai politik memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi anggota DPRD yang berasal dari partainya, namun implementasi dari fungsi tersebut masih lemah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus partai politik tingkat kota, dapat disimpulkan bahwa partai-partai tersebut belum memiliki sistem pengawasan yang sistematis dan terukur terhadap kadernya di DPRD. Mekanisme evaluasi kinerja legislatif, seperti pemantauan kehadiran, kontribusi dalam rapat paripurna, sikap politik terhadap kebijakan daerah, maupun pelaporan kegiatan kepada partai, belum dilakukan secara terstruktur. Bahkan dalam beberapa kasus, pengurus partai tidak mengetahui secara pasti apa saja yang telah dan sedang dilakukan oleh anggota DPRD dari partainya.

Salah satu penyebab lemahnya pengawasan ini adalah minimnya komunikasi politik antara struktur partai dan fraksi di DPRD. Idealnya, fraksi

sebagai perpanjangan tangan partai di lembaga legislatif bertanggung jawab untuk menyampaikan agenda dan keputusan politik partai dalam setiap forum rapat maupun pembahasan kebijakan di DPRD. Namun realitas di Tanjungbalai menunjukkan bahwa fraksi-fraksi legislatif bersifat semi-otonom dan lebih sering beroperasi atas dasar kepentingan koalisi maupun orientasi personal. Akibatnya, garis koordinasi antara partai dan fraksi menjadi kabur, dan anggota DPRD lebih bebas dalam menentukan sikap politik tanpa mempertimbangkan arahan partai secara langsung.

Selain itu, fungsi pengawasan partai juga terhambat oleh ketiadaan sistem reward and punishment yang jelas. Banyak partai politik di Tanjungbalai belum memiliki perangkat kelembagaan seperti dewan kehormatan atau komisi pengawasan internal yang bekerja secara aktif dalam memantau dan menilai kinerja kader. Pengawasan selama ini lebih bersifat informal dan insidental, seperti pemberian teguran lisan jika terdapat sorotan publik terhadap seorang anggota DPRD, atau evaluasi menjelang pemilu ketika partai mulai menyusun daftar calon legislatif baru. Sanksi terhadap kader yang melanggar aturan atau tidak menunjukkan kinerja yang baik juga jarang diterapkan secara tegas, karena pertimbangan politis dan kekuatan internal dari kader tersebut di dalam struktur partai.

Kelemahan lainnya terletak pada aspek partisipasi publik dalam proses pengawasan internal partai. Seharusnya,

partai menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan terkait kinerja wakil rakyat. Namun sayangnya, masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk ikut serta dalam evaluasi kinerja anggota DPRD melalui partai. Tidak ada forum terbuka yang mempertemukan masyarakat dengan wakil rakyat melalui fasilitasi partai, dan partai sendiri tidak menyediakan sistem pelaporan berbasis masyarakat. Alhasil, ketika masyarakat kecewa terhadap anggota DPRD, mereka lebih memilih menyampaikannya melalui media sosial atau demonstrasi, bukan melalui struktur partai yang mengusung legislator tersebut.

Dalam praktiknya, banyak anggota DPRD Kota Tanjungbalai yang hanya aktif ketika momentum pemilu semakin dekat. Setelah terpilih, komunikasi mereka dengan partai maupun dengan konstituen menjadi sangat minim. Partai politik pun seolah kehilangan kontrol atas kader yang telah mereka usung. Keadaan ini diperburuk dengan masih kuatnya budaya politik transaksional, di mana loyalitas kader lebih didasarkan pada kepentingan jangka pendek, bukan pada ideologi partai atau komitmen moral terhadap rakyat. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang seharusnya melekat pada partai politik menjadi tidak berjalan secara ideal.

Di sisi lain, beberapa partai politik mengklaim telah melakukan pengawasan melalui agenda rapat internal dan laporan rutin, namun saat ditelusuri lebih lanjut, kegiatan tersebut tidak memiliki

indikator keberhasilan yang objektif dan tidak terdokumentasi dengan baik. Bahkan ada partai yang tidak memiliki dokumentasi kinerja kader selama lima tahun masa jabatan, yang menunjukkan lemahnya kesadaran kelembagaan dalam membangun sistem akuntabilitas internal.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa partai politik di Tanjungbalai belum memainkan perannya secara maksimal dalam mengawasi anggota DPRD. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat normatif dan belum menyentuh esensi substantif dari tanggung jawab politik. Jika hal ini terus dibiarkan, maka posisi partai hanya akan menjadi kendaraan politik semata, bukan sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol dan pembinaan terhadap kekuasaan legislatif.

Untuk memperbaiki kondisi ini, partai politik perlu melakukan penguatan kelembagaan internal, seperti membentuk unit khusus pengawasan kader, menyusun indikator kinerja legislatif yang terukur, serta membuka ruang partisipasi publik dalam evaluasi kinerja anggota DPRD. Di samping itu, perlu ada kesadaran bersama di antara elite partai bahwa keberhasilan partai dalam jangka panjang sangat bergantung pada akuntabilitas kadernya di lembaga perwakilan. Dengan kata lain, partai politik tidak boleh hanya aktif dalam masa kampanye, tetapi harus menjadi institusi politik yang terus mengawal kualitas demokrasi melalui fungsi pengawasan yang efektif terhadap kadernya.

2) Kendala yang Dihadapi Partai Politik dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Anggota Legislatif di Daerah

Fungsi pengawasan partai politik terhadap anggota legislatif di daerah, seperti DPRD Kota Tanjungbalai, secara teoritis merupakan bagian penting dari sistem checks and balances dalam demokrasi representatif. Namun dalam praktiknya, fungsi tersebut mengalami berbagai hambatan yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap anggota legislatif, khususnya mereka yang berasal dari partai pengusungnya. Kendala-kendala tersebut muncul dari sejumlah faktor yang saling terkait dan berlapis, baik dari segi kelembagaan, budaya politik, hingga kualitas personal para pengurus partai itu sendiri.

Secara kelembagaan, struktur organisasi partai politik di tingkat daerah sering kali belum matang. Banyak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai yang tidak memiliki sistem manajemen kaderisasi dan mekanisme evaluasi kinerja yang sistematis terhadap anggota legislatif. Fungsi monitoring dan kontrol yang seharusnya dijalankan melalui lembaga-lembaga internal seperti badan kehormatan atau dewan pengawas partai, kerap kali tidak difungsikan dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya anggaran operasional. Bahkan, dalam banyak kasus, partai tidak memiliki data atau dokumentasi yang memadai mengenai rekam jejak, agenda kegiatan, maupun sikap politik dari anggotanya yang duduk di DPRD. Akibatnya, pengawasan yang

dilakukan cenderung bersifat informal dan insidental, tanpa pijakan yang jelas dan terukur.

Lemahnya sistem pengawasan tersebut diperburuk dengan tidak optimalnya hubungan koordinasi antara struktur partai dengan fraksi di DPRD. Fraksi yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan partai dalam memperjuangkan visi dan misi partai, sering kali menjalankan fungsinya secara otonom tanpa kontrol langsung dari DPC. Hal ini menyebabkan terjadinya disharmonisasi antara kebijakan partai dan tindakan politik di parlemen. Dalam beberapa kasus, fraksi justru lebih loyal kepada koalisi strategis di DPRD daripada kepada instruksi partai. Ketidaksinkronan ini mencerminkan lemahnya pengaruh partai terhadap perilaku politik anggota legislatifnya sendiri, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas fungsi pengawasan partai.

Dari sisi budaya politik, pragmatisme dan transaksionalisme menjadi tantangan yang serius. Banyak kader partai yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bukan karena dorongan ideologis atau panggilan pengabdian, melainkan semata-mata karena melihat peluang kekuasaan dan keuntungan material. Setelah berhasil terpilih, loyalitas mereka terhadap partai melemah, dan dalam banyak hal, hubungan mereka dengan partai hanya bersifat administratif. Partai kehilangan daya kontrol karena tidak memiliki leverage yang cukup untuk mendisiplinkan anggotanya. Bahkan, dalam beberapa kondisi, anggota DPRD

justru menjadi tokoh yang dominan dalam internal partai, terutama jika mereka memiliki kekuatan elektoral dan sumber daya finansial yang besar. Fenomena ini menciptakan ketergantungan balik di mana partai enggan mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang menyimpang karena takut kehilangan dukungan logistik atau basis massa.

Pragmatisme politik ini juga menyebabkan partai cenderung bersikap permisif terhadap perilaku anggota legislatifnya, selama tidak menimbulkan kegaduhan publik yang besar. Sanksi internal jarang dijatuhkan, dan proses evaluasi lebih banyak dilakukan secara informal dan tidak transparan. Bahkan, ada kecenderungan bahwa fungsi pengawasan hanya dilakukan menjelang pemilu ketika partai mulai menyusun daftar calon legislatif baru. Dalam situasi seperti ini, proses pengawasan berubah menjadi proses seleksi elektoral, bukan proses pembinaan kader yang berkelanjutan.

Selain faktor struktural dan kultural, kendala personal turut memberikan andil terhadap lemahnya fungsi pengawasan partai. Banyak pengurus partai di daerah yang tidak memiliki kompetensi teknis maupun pemahaman konseptual mengenai pengawasan terhadap wakil rakyat. Lemahnya pendidikan politik internal, minimnya pelatihan kader, dan rendahnya akses terhadap sumber daya intelektual membuat pengurus partai tidak mampu menyusun instrumen evaluasi yang objektif dan sistematis. Bahkan, beberapa pengurus partai

menganggap bahwa pengawasan merupakan urusan pusat partai atau kewenangan dari lembaga lain seperti Badan Kehormatan DPRD, sehingga mereka mengabaikan tanggung jawab pengawasan yang melekat dalam struktur partai itu sendiri.

Relasi personal antara pengurus partai dan anggota DPRD juga sering kali menjadi penghalang bagi terlaksananya pengawasan yang objektif. Hubungan pertemanan, kekerabatan, atau kepentingan bisnis menyebabkan pengurus partai enggan menegur atau memberikan sanksi kepada anggota DPRD meskipun yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etik atau menunjukkan kinerja yang buruk. Dalam beberapa kasus, pengurus partai justru melindungi kader yang menyimpang demi menjaga keharmonisan internal atau demi keuntungan politik tertentu. Kondisi ini menciptakan iklim patronase dalam tubuh partai, di mana loyalitas personal lebih dominan daripada integritas kelembagaan.

Kendala-kendala di atas memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan partai politik terhadap anggota legislatif di daerah masih menghadapi tantangan yang kompleks dan sistemik. Kelemahan pengawasan ini bukan hanya berdampak pada merosotnya akuntabilitas wakil rakyat, tetapi juga merugikan kualitas demokrasi lokal secara keseluruhan. Partai politik kehilangan fungsinya sebagai institusi demokratis yang menjamin bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya penguatan kelembagaan partai politik di tingkat daerah, termasuk membangun sistem pengawasan kader yang profesional, akuntabel, dan partisipatif. Pendidikan politik harus ditingkatkan, baik untuk pengurus partai maupun untuk calon legislator. Selain itu, perlu ada reformasi internal untuk membangun budaya organisasi yang menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Partai juga harus membuka diri terhadap partisipasi publik dalam mengevaluasi kinerja wakil rakyat, agar proses pengawasan tidak bersifat eksklusif dan tertutup.

Tanpa pembenahan yang menyeluruh, partai politik hanya akan menjadi kendaraan politik menjelang pemilu, tanpa memainkan peran substantif dalam proses demokrasi sehari-hari. Oleh karena itu, memperkuat fungsi pengawasan partai terhadap anggota legislatif bukan hanya merupakan agenda internal partai, tetapi juga menjadi bagian penting dari penguatan demokrasi lokal dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah.

D. Kesimpulan

Simpulan

Partai politik di Kota Tanjungbalai memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota DPRD, namun peran tersebut belum dijalankan secara optimal karena lemahnya mekanisme internal, rendahnya

kapasitas organisasi partai, serta dominasi kepentingan pragmatis.

Hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan berasal dari aspek struktural (minimnya infrastruktur pengawasan), kultural (budaya patronase dan transaksional), serta personal (konflik kepentingan antara pengurus partai dan anggota DPRD).

Saran

Partai politik perlu membentuk badan internal yang khusus mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggota legislatif secara rutin dan transparan, serta menyusun sistem sanksi dan penghargaan yang tegas.

Pemerintah dan masyarakat sipil di Tanjungbalai harus didorong untuk mendorong reformasi internal partai melalui pendidikan politik dan advokasi terhadap pentingnya akuntabilitas politik.

E. Daftar Pustaka

1. Jurnal

Duverger, Maurice. (2001). *Partai Politik dan Sistem Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Sartori, Giovanni. (1995). *Parties and Party Systems*. Cambridge University Press.

Nuraini, R. (2017). "Akuntabilitas Anggota DPRD dan Peran Partai Politik". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hidayat, S. (2016). *Demokrasi dan Tantangan Pengawasan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

2. Wawancara

Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Tanjungbalai, 23 Juli 2025.

Wawancara dengan anggota DPRD Fraksi PKS, 25 Juli 2025.

Media Tanjungbalai Pos, edisi Mei–Juli 2025.